



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.

BAB II SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Jenis pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan Pelatihan Kerja dengan indikator :
 1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
 3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
 - b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
 - c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama;
 - d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek dengan indikator besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek;
 - e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan indikator :
 1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan;
 2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan Ketenagakerjaan, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Di luar jenis pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN



Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan Pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Ketenagakerjaan di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM Bidang Ketenagakerjaan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

| NO | JENIS PELAYANAN | STANDAR PELAYANAN MINIMAL | | TARGET | | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-----------------------------------|--|-------|--------|------|------|------|------|------|--------------------|
| | | INDIKATOR | NILAI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pelayanan Pelatihan Kerja | a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 75% | 40 % | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | Dinas Nakertransos |
| | | b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 60% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | Dinas Nakertransos |
| | | c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 60% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | Dinas Nakertransos |
| 2 | Pelayanan penempatan Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 70% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Dinas Nakertransos |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 3 | Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 50% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | Dinas Nakertransos |
| 4 | Pelayanan kepesertaan jamsostek | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek | 50% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | Dinas Nakertransos |
| 5 | Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan | a. Besaran Pemeriksaan Perusahaan | 45% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | Dinas Nakertransos |
| | | b. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | 50% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | Dinas Nakertransos |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN SPM KETENAGAKERJAAN

| NO | INDIKATOR SPM | KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI(>) | PERMASALAHAN | FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN |
|----|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | > | - | a. Tersedianya anggaran yang cukup b. Animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup besar |
| 2. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | = | - | Animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup besar |
| 3. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | > | - | Animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan cukup besar |
| 4. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | < | a. Kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan b. Informasi pasar kerja belum tersebar secara maksimal | a. Adanyapencari kerja sesuai persyaratan b. Informasi pasar kerja yang tersebar luas |
| 5. | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | < | a. Tidak semua tenaga kerja yang bermasalah mau melapor ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Sosial b. Tidak semua kasus diselesaikan dengan Perjanjian bersama | Adanya penyelesaian kasus dengan perjanjian bersama secara menyeluruh |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|--|--|
| 6. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek | < | a. Kurangnya kesadaran pengusaha mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jamsostek b. Kurangnya pegawai pengawasan ketenagakerjaan | a. Meningkatnya kesadaran pengusaha mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jamsostek b. Adanya tenaga pengawasan ketenagakerjaan yang cukup |
| 7. | Besaran pemeriksaan perusahaan | < | Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia pengawasan | Tercukupinya anggaran dan sumber daya manusia pengawasan |
| 8. | Besaran pengujian peralatan di perusahaan | | a. Belum adanya alat uji peralatan perusahaan b. Belum adanya pengawas ahli | a. Adanya alat uji peralatan perusahaan b. Adanya pengawas ahli |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAPORAN STATUS AWAL PENERAPAN SPM DI DAERAH KABUPATEN/KOTA :

BULAN :

TAHUN :

PROFIL DAN INTEGRASI SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN KE DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

| NO | INDIKATOR SPM | CAPAIAN 2012 | | TARGET | | TARGET | | TARGET NASIONAL | | BERI TANDA "V" BILA TELAH DIMUAT DALAM DOKUMEN | | | |
|----|---|-----------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------------------|-------|---|---------------|-------|-----------------|
| | | | | 2013 | | 2014 | | TAHUN | NILAI | RKPD | RENJA SKPD | RPJMD | RENSTRA SKPD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 108 | 80% | 648 | 80% | 720 | 75% | 2014 | 75% | V | V | V | V |
| | | 135 | | 810 | | 960 | | | | | | | |
| 2 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 36 | 60% | 72 | 60% | 72 | 60% | 2014 | 60% | V | V | V | V |
| | | 60 | | 120 | | 120 | | | | | | | |
| 3 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 15 | 88% | 15 | 60% | 15 | 60% | 2014 | 60% | V | V | V | V |
| | | 17 | | 25 | | 25 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------|-----|----|----|----|----|
| 4 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 5.886 | 38% | 6.232 | 40% | 7.000 | 45% | 2014 | 75% | V | V | V | V |
| | | 15.591 | | 15.591 | | 15.591 | | | | | | | |
| 5 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 1 | 20% | 5 | 33% | 6 | 40% | 2014 | 50% | V | V | V | V |
| | | 5 | | 15 | | 15 | | | | | | | |
| 6 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja | 4.969 | 44% | 5.200 | 46% | 5.500 | 49% | 2014 | 50% | V | V | V | V |
| | | 11.268 | | 11.268 | | 11.262 | | | | | | | |
| 7 | Besaran pemeriksaan perusahaan | 188 | 27% | 200 | 29% | 250 | 36% | 2014 | 45% | V | V | V | V |
| | | 698 | | 698 | | 698 | | | | | | | |
| 8 | Besaran pengujian peralatan di perusahaan | 24 | 3% | | 0% | | 0% | 2014 | 50% | | | | |
| | | 698 | | | | | | | | | | | |


BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

| NO | JENIS PELAYANAN | INDIKATOR | KEGIATAN | VOLUME | SATUAN | NILAI | JUMLAH | TARGET | JUMLAH DANA | TARGET | JUMLAH DANA | TARGET | JUMLAH DANA | TARGET | JUMLAH DANA |
|--|-----------------------------------|---|--|------------|--|-------------|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | | | | | | | | 2013 | Rp | 2014 | Rp | 2015 | Rp | 2016 | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Pelayanan Pelatihan Kerja | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | | | | | | 60% | 1,359,200,000 | 65% | 1,500,000,000 | 70% | 1,650,000,000 | 75% | 1,815,000,000 |
| | | | Pelatihan berbasis kompetensi (38 paket) | 6 | paket | 200,000,000 | 200,000,000 | 38 paket | 1,359,200,000 | 40 paket | 1,500,000,000 | 40 paket | 1,650,000,000 | 40 paket | 1,815,000,000 |
| | | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | | | | | | | 50% | 165,000,000 | 55% | 259,000,000 | 60% | 284,900,000 | |
| | | | Pelatihan berbasis masyarakat (5 paket) | | | | | | 5 paket | 165,000,000 | 4 paket | 259,000,000 | 4 paket | 284,900,000 | |
| | | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | | | | | | | 45% | 19,138,000 | 50% | 19,138,000 | 55% | 19,138,000 | 60% |
| Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan | 1 | | paket | 19,138,000 | 19,138,000 | 1 paket | 19,138,000 | 1 paket | 19,138,000 | 1 paket | 19,138,000 | 1 paket | 21,051,800 | | |
| 2 | Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | | | | | | 55% | 242,000,000 | 60% | 275,000,000 | 65% | 302,500,000 | 70% | 332,750,000 |
| | | | Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 12, 3, 3 | buku IPK, kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaan BKK | 100,000,000 | 100,000,000 | 12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaan BKK, 1 kl JMF | 167,000,000 | 12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaan BKK, 1 kl JMF | 150,000,000 | 12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaan BKK, 1 kl JMF | 165,000,000 | 12 buku IPK, 2 kali sosialisasi PTKDN, 1 kl pembinaan BKK, 1 kl JMF | 181,500,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|------|---|------------|------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| | | | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja | 3, 3 | Kali sosialisasi PTKLN, Sosialisasi Trafficking | 50,000,000 | 50,000,000 | 4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Trafficking | 75,000,000 | 4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Trafficking |  0,000 | 4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Trafficking | 137,500,000 | 4 Kali sosialisasi PTKLN, 3 kali Sosialisasi Trafficking | 151,250,000 |
| 3 | Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama | | | | | | 35% | 80,000,000 | 40% | 80,000,000 | 45% | 88,000,000 | 50% | 96,800,000 |
| | | | Fasilitasi Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial | 20 | Kasus | 25,000,000 | 25,000,000 | 20 kasus | 30,000,000 | 20 Kasus | 30,000,000 | 20 Kasus | 33,000,000 | 20 Kasus | 36,300,000 |
| | | | Sosialisasi berbagai peraturan tentang pelaksanaan ketenagakerjaan | 3 | Kali | 40,000,000 | 40,000,000 | 3 Kali | 50,000,000 | 3 Kali | 50,000,000 | 3 kali | 55,000,000 | 3 kali | 60,500,000 |
| 4 | Pelayanan Kepesertaan Jamsostek | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek | | | | | | 35% | 25,000,000 | 40% | 50,000,000 | 45% | 75,000,000 | 50% | 100,000,000 |
| | | | Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek | 90 | Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | 90 orang | 25,000,000 | 80 Orang | 50,000,000 | 270 Orang | 75,000,000 | 360 Orang | 100,000,000 |
| 5 | Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan | Besaran Pemeriksaan perusahaan | | | | | | 30% | 50,000,000 | 35% | 55,000,000 | 40% | 281,050,000 | 45% | 394,000,000 |
| | | | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan | 200 | persh | 30,000,000 | 30,000,000 | 238 Persh | 50,000,000 | 272 Persh | 55,000,000 | 315 Persh | 281,050,000 | 698 Persh | 394,000,000 |
| | | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | | | | | | 35% | | 40% | | 45% | | 50% | |
| | | JUMLAH | | | | | | | 2,191,476,000 | | 2,788,276,000 | | 3,699,376,000 | | 4,274,003,600 |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



